

# Outline Journal of Management and Accounting

Journal homepage: <https://journal.outlinepublisher.com/index.php/OJMA/index>

Research Article

## Assessing Regional Government Financial Performance through Financial Ratio Analysis: A Case Study of Jayawijaya Regency, 2013–2023

(Penilaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah melalui Analisis Rasio Keuangan: Studi Kasus Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013–2023)

Abraham Busiara<sup>1\*</sup>, Mesak Iek<sup>2</sup>, Halomoan Hutajulu<sup>3</sup>, Muammar Rinaldi<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Negeri Medan

\*Correspondence: E-mail: [abrahambusiara10@gmail.com](mailto:abrahambusiara10@gmail.com)

### Keywords:

Financial Performance, Regional Autonomy, Fiscal Efficiency, PAD Effectiveness, Jayawijaya Regency, Local Government Budget, Financial Ratio Analysis

### Abstract

This study analyzes the financial performance of the Jayawijaya Regency Government from 2013 to 2023 using key financial ratios: autonomy, effectiveness, growth, and efficiency. The research employs a mixed-method approach, combining quantitative analysis of budget realization data with qualitative insights from key informants. The results show that while the effectiveness of locally generated revenue (PAD) was high—averaging 166.38%—the autonomy ratio remained critically low at 6.44%, reflecting substantial dependence on central transfers. Growth in revenue and expenditure was also suboptimal, falling below 30%, while efficiency ratios hovered around 99%, indicating limited fiscal flexibility. Strategic responses identified include digital tax reform, diversification of PAD sources, and creation of local enterprises. Despite promising policy directions, structural limitations such as geographic isolation and administrative capacity remain major obstacles. The study concludes that sustainable fiscal management in special autonomy regions requires not only technical effectiveness but also systemic reforms in institutional governance and local economic empowerment. The findings offer a valuable reference for policymakers seeking to enhance regional financial resilience in Indonesia's decentralized governance framework.

## PENDAHULUAN

Kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks sistem keuangan Indonesia yang terdesentralisasi, evaluasi efisiensi, efektivitas, kemandirian, dan pertumbuhan pengelolaan keuangan daerah telah menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah. Hal ini ditegaskan oleh peraturan nasional, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021, yang memberikan pedoman komprehensif untuk mengelola keuangan daerah dan menetapkan rasio keuangan tertentu sebagai indikator kinerja. Rasio-rasio ini—otonomi, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan—menawarkan metrik yang dapat diukur untuk menilai seberapa baik pemerintah daerah mengalokasikan dan mengelola sumber daya keuangannya untuk memenuhi tujuan pemberian layanan publik dan target pembangunan daerah.

Kinerja keuangan juga terkait erat dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, pemerintah daerah wajib melaporkan kegiatan keuangannya secara berkala dan terbuka, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi hasil tata kelola pemerintahan. Kinerja harus mencerminkan pemanfaatan sumber daya keuangan secara optimal untuk mencapai program pembangunan yang ditargetkan sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJMD) dan rencana kerja daerah tahunan (RKPD). Efisiensi dalam hal ini mengacu pada kemampuan pemerintah untuk menghasilkan output yang maksimal dengan input keuangan yang minimal, sedangkan otonomi mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mempertahankan operasinya secara independen dari transfer pemerintah pusat.

Meskipun kerangka regulasinya sudah ada, banyak pemerintah daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai otonomi fiskal secara penuh. Kasus Kabupaten Jayawijaya yang terletak di Papua Pegunungan—daerah yang diberi status otonomi khusus—mengilustrasikan tantangan tersebut. Hingga tahun 2020, Jayawijaya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangannya, yang menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang tepat. Namun, data fiskal mengungkap cerita yang berbeda: rasio kemandirian finansial hanya sebesar 4,83% pada tahun 2020, yang menunjukkan bahwa kurang dari 5% dari total pendapatan dihasilkan dari pendapatan asli daerah (PAD). Ketergantungan yang besar pada transfer antarpemerintah ini menggarisbawahi kerentanan posisi fiskal daerah.

Permasalahan inti penelitian yang dibahas dalam kajian ini berkisar pada pemahaman kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dengan mengkaji empat rasio keuangan utama: otonomi, efektivitas, pertumbuhan, dan efisiensi selama periode 2013–2023. Meskipun opini audit WTP positif, analisis yang lebih mendalam terhadap rasio-rasio keuangan tersebut mengungkapkan adanya inkonsistensi dalam kesehatan dan keberlanjutan fiskal. Yang menjadi perhatian khusus adalah konsistensi klasifikasi rasio otonomi keuangan di bawah pola hubungan “instruktif”, di mana pengaruh pemerintah pusat mendominasi operasi fiskal daerah. Selain itu, pertumbuhan belanja daerah belum menghasilkan peningkatan yang proporsional dalam infrastruktur atau layanan publik.

Penelitian sebelumnya telah menyoroti berbagai dimensi kinerja keuangan daerah dengan menggunakan kerangka analisis yang serupa. Misalnya, penelitian Rindang Arumdari (2019) di Medan berfokus pada efektivitas dan kemandirian keuangan, sementara Arfan Pasetya (2019) mengevaluasi realisasi anggaran di Kabupaten OKI dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Penelitian lain, seperti penelitian Syafia Nurul Aeni (2020) dan Norma (2020), mengeksplorasi efisiensi dan efektivitas keuangan di berbagai kabupaten, tetapi sering kali tidak mengintegrasikan keempat rasio utama secara komprehensif. Yang membedakan penelitian saat ini adalah cakupan longitudinalnya, keluasan analisis, dan penggabungan data kuantitatif dan wawasan kualitatif melalui wawancara.

Konteks khusus Jayawijaya menawarkan landasan yang subur untuk studi kasus, terutama mengingat keunikan geopolitiknya dan tantangan sosial-ekonomi yang dihadapinya. Kabupaten ini memiliki potensi di sektor-sektor seperti pariwisata, pertanian, dan pengembangan usaha lokal, namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Literatur yang ada menyediakan kerangka kerja untuk memahami hubungan teoritis antara praktik pengelolaan keuangan yang baik dan peningkatan otonomi daerah, tetapi belum sepenuhnya mengkaji interaksi dinamis antara kebijakan fiskal, kinerja, dan perencanaan strategis di daerah-daerah terpencil dan daerah otonomi khusus seperti Jayawijaya.

Literatur yang dikaji dalam studi ini termasuk peraturan pemerintah, penelitian akademis, dan laporan keuangan menunjukkan kebutuhan yang konsisten akan strategi yang lebih kuat untuk meningkatkan kesehatan fiskal. Kinerja rendah yang konsisten dalam rasio otonomi sangat kontras dengan skor efektivitas PAD yang

tinggi, yang rata-rata mencapai 166,38% antara tahun 2013 dan 2023. Namun, efektivitas ini sebagian besar didorong oleh penetapan target yang konservatif daripada ekspansi ekonomi yang sesungguhnya. Demikian pula, rasio pertumbuhan keuangan tetap di bawah 30%, yang menunjukkan stagnasi dalam pembangunan fiskal daerah meskipun transfer pusat meningkat.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2013 hingga 2023 melalui penilaian rinci rasio keuangan otonomi, efektivitas, efisiensi, dan pertumbuhan dan mengidentifikasi jalur strategis untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangannya. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi data deret waktu dengan wawasan strategis yang diperoleh dari para pemangku kepentingan utama, yang menawarkan gambaran komprehensif tentang kinerja fiskal dan keterbatasan kelembagaan. Penelitian ini juga berupaya untuk berkontribusi pada perencanaan pembangunan daerah dengan merekomendasikan strategi praktis dan berbasis bukti untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada pendanaan pemerintah pusat.

## METODE

### *Desain Penelitian*

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara objektif kondisi kinerja keuangan dengan menggunakan data numerik yang diolah secara statistik. Pendekatan ini cocok untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya berdasarkan indikator rasio keuangan yang telah ditetapkan. Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan untuk menilai posisi keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya dengan membandingkan komponen pendapatan dan belanja selama rentang waktu tertentu, dari tahun 2013 hingga tahun 2023.

Orientasi kuantitatif dilengkapi dengan komponen deskriptif kualitatif, khususnya dalam analisis strategi pengembangan fiskal. Hal ini dicapai melalui wawancara terstruktur dan analisis dokumen, yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan di luar angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan. Pendekatan metode campuran semacam itu memperkuat kedalaman analisis dan relevansi rekomendasi strategis.

### *Sumber Data*

Studi ini menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Jayawijaya. Informan tersebut meliputi pejabat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), inspektorat daerah, dan kantor pemerintah daerah (OPD) lain yang memiliki kewenangan terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Wawancara dilakukan secara terarah namun fleksibel, sehingga memungkinkan eksplorasi lebih mendalam terhadap proses pembuatan kebijakan dan strategi fiskal daerah.

Data sekunder terdiri dari dokumen resmi seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2013 sampai dengan 2023. Dokumen-dokumen tersebut bersumber dari arsip BPKAD Jayawijaya, Badan Pusat Statistik (BPS), dan basis data DJPK (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan). Laporan keuangan tersebut menyediakan data dasar untuk menghitung rasio-rasio keuangan, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), transfer pemerintah pusat, belanja, dan target anggaran.

### *Indikator dan Rumus Rasio*

Empat rasio keuangan utama digunakan sebagai indikator kinerja:

Rasio Otonomi Keuangan mengukur sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatannya secara mandiri dari dana pemerintah pusat. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\text{Otonomi Keuangan} = \frac{\text{PAD}}{\text{Transfer Pusat} + \text{Pinjaman}} \times 100\%$$

Rasio Efektivitas menilai keberhasilan realisasi pendapatan dalam memenuhi target PAD. Rumusnya adalah:

$$\text{Rasion Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}} \times 100\%$$

Rasio Pertumbuhan mengevaluasi perubahan pendapatan atau pengeluaran tahun ke tahun:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{PAD}_n - \text{PAD}_{n-1}}{\text{PAD}_{n-1}} \times 100\%$$

Rasio Efisiensi membandingkan total pengeluaran dengan total pendapatan:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pengeluaran}}{\text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Rasio ini mengikuti standar nasional berdasarkan pedoman Kementerian Dalam Negeri (Permendagri No. 27 Tahun 2021) dan konsisten dengan praktik yang diterapkan dalam studi kinerja keuangan daerah lainnya.

### ***Pemilihan Informan dan Prosedur Wawancara***

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan purposive sampling, yaitu metode pengambilan sampel non-probabilitas yang menargetkan individu berdasarkan relevansinya dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini memastikan bahwa data diperoleh dari mereka yang paling memahami pengelolaan keuangan di daerah. Wawancara melibatkan tiga tokoh kunci dari BPKAD dan inspektorat daerah, yang semuanya terlibat langsung dalam proses perencanaan, penganggaran, dan audit keuangan pemerintah daerah.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk tetap fokus pada topik yang telah ditentukan sebelumnya sekaligus memberi ruang bagi munculnya wawasan baru. Metode ini efektif untuk mengeksplorasi dinamika kelembagaan, pertimbangan kebijakan, dan persepsi internal terhadap tantangan fiskal. Metode ini juga memungkinkan triangulasi temuan dari data dokumenter.

### ***Teknik Analisis Data***

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analitis deskriptif, dengan fokus pada empat rasio keuangan utama. Tujuan utamanya adalah mengidentifikasi pola dan tren selama periode 11 tahun yang diteliti, dengan menggunakan tabel dan alat bantu visual untuk memudahkan interpretasi. Hasil rasio keuangan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori—seperti “instruktif” untuk otonomi rendah atau “sangat efektif” untuk realisasi PAD di atas 100%—berdasarkan tolok ukur nasional yang diterima.

Pada bagian kualitatif, data dari wawancara dianalisis secara tematis. Pengodean tematis memungkinkan identifikasi tema-tema yang berulang terkait dengan perencanaan strategis, kendala kelembagaan, dan inisiatif reformasi. Integrasi data kuantitatif dan kualitatif memastikan pandangan yang komprehensif tentang kinerja keuangan Jayawijaya, yang menyoroti tidak hanya hasil numerik tetapi juga realitas kelembagaan di baliknya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

#### ***Analisis Rasio Otonomi Keuangan***

Rasio otonomi keuangan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai operasinya menggunakan pendapatannya sendiri tanpa terlalu bergantung pada transfer pusat. Dari tahun 2013 hingga 2023, rasio otonomi Kabupaten Jayawijaya tetap rendah, rata-rata hanya 6,44%, jauh di bawah tolok ukur kemandirian nasional. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.1, kinerja ini menunjukkan hubungan instruksional yang terus-menerus dengan pemerintah pusat, di mana Jayawijaya terutama bergantung pada transfer dan pinjaman pusat daripada pada pendapatan yang dihasilkan sendiri.

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terjadi sedikit fluktuasi, struktur keuangan Jayawijaya sangat didominasi oleh ketergantungan. Misalnya, pada tahun 2013, hanya 4,00% dari total pendapatan yang berasal dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan sisanya terdiri dari dana transfer. Pada tahun 2023, angka ini hanya sedikit membaik menjadi 5,34%. Tingkat ketergantungan fiskal ini menyoroti kebutuhan penting untuk merestrukturisasi strategi pendapatan dengan meningkatkan pengumpulan dan perluasan sumber PAD.

Angka-angka tersebut merupakan gambaran kapasitas fiskal yang lemah secara struktural di daerah-daerah yang kurang berkembang atau memiliki keterbatasan geografis. Lokasi Jayawijaya yang terpencil, infrastruktur yang terbatas, dan basis ekonomi yang kurang berkembang kemungkinan berkontribusi terhadap kinerja yang buruk ini, yang selanjutnya memperkuat kerentanan fiskalnya.

#### ***Efektivitas Pengumpulan Pendapatan Asli Daerah (PAD)***

Meskipun otonominya rendah, Kabupaten Jayawijaya menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dalam menghimpun PAD. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.2, rasio efektivitas rata-rata dari tahun 2013

hingga 2023 adalah 166,38%, tingkat yang tergolong “sangat efektif”. Artinya, pendapatan yang dihimpun seringkali jauh melampaui target PAD yang ditetapkan dalam anggaran tahunan.

Misalnya, pada tahun 2014, Jayawijaya mencapai efektivitas 294,32%, dan pada tahun 2023, rasionya mencapai hampir 300%. Namun, efektivitas yang luar biasa ini sebagian disebabkan oleh rendahnya target acuan. Alih-alih mencerminkan perbaikan nyata dalam sistem pemungutan pajak atau perluasan ekonomi, hasil ini menunjukkan bahwa kinerja didorong oleh target PAD yang terlalu konservatif.

Bahkan dengan catatan realisasi yang kuat, hal ini harus ditafsirkan dengan hati-hati. Lintasan peningkatan rasio efektivitas menutupi stagnasi yang lebih dalam dalam pertumbuhan PAD, yang akan dibahas di bagian berikutnya. Untuk pengembangan pendapatan yang berkelanjutan, daerah tidak hanya harus melampaui targetnya tetapi juga harus menaikkannya secara strategis dan mengembangkan kebijakan untuk pemberdayaan ekonomi yang nyata.

### ***Kinerja Pertumbuhan Keuangan***

Pertumbuhan merupakan indikator penting kemampuan suatu daerah untuk memperkuat posisi fiskalnya dari waktu ke waktu. Kinerja Jayawijaya dalam hal ini belum optimal. Rata-rata pertumbuhan PAD dari tahun 2013 hingga 2023 adalah 18,70%, yang termasuk dalam kategori “tidak berhasil” (<30%) sebagaimana disajikan dalam Tabel 5.3. Selain itu, rata-rata pertumbuhan total pendapatan selama periode yang sama adalah 9,17% (Tabel 5.4), dan pertumbuhan belanja adalah 10,28% (Tabel 5.5), keduanya di bawah ambang batas optimal.

Lonjakan positif yang paling menonjol terjadi pada tahun 2014, ketika PAD tumbuh sebesar 106,42%, menyusul peningkatan besar dalam pendapatan daerah dari Rp30 miliar menjadi Rp62 miliar. Namun, pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhannya stagnan atau menurun. Misalnya, PAD turun sebesar 33,88% pada tahun 2019 dan turun lagi sebesar 32,49% pada tahun 2021. Volatilitas tersebut mencerminkan kerentanan sistemik, termasuk perluasan basis pajak yang tidak memadai, keragaman ekonomi yang terbatas, dan ketergantungan yang berlebihan pada variabel eksternal seperti transfer dan bantuan nasional.

Data tersebut juga mengungkap simetri struktural antara pendapatan dan pengeluaran: seiring peningkatan pendapatan, pengeluaran pun ikut meningkat—tanpa menghasilkan surplus yang berarti. Pola siklus ini menyiratkan bahwa perencanaan pengeluaran lebih bersifat reaktif daripada strategis, sehingga membatasi fleksibilitas dan ketahanan fiskal.

### ***Efisiensi dalam Manajemen Keuangan***

Rasio efisiensi mengukur sejauh mana pemerintah daerah memanfaatkan pendapatan yang tersedia untuk menutupi pengeluaran. Rasio efisiensi yang ideal adalah di bawah 100%, yang menunjukkan bahwa pemerintah membelanjakan lebih sedikit daripada yang diperolehnya. Rasio efisiensi rata-rata Jayawijaya dari tahun 2013 hingga 2023 adalah 99,09%, yang menggolongkannya sebagai “kurang efisien”.

Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.6, meskipun rasionya tetap mendekati 100% selama sebagian besar tahun, rasionya kadang-kadang melampaui ambang batas ini, seperti pada tahun 2015 (102,77%) dan 2017 (105,05%), yang menyiratkan defisit fiskal. Ketidakmampuan kawasan untuk mempertahankan rasio efisiensi yang rendah secara konsisten mencerminkan mekanisme pengendalian biaya yang buruk dan kebijakan peningkatan pendapatan yang tidak memadai.

Meskipun tidak terlalu tinggi, rasio 99,09% tidak memberikan banyak ruang untuk manuver fiskal. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua pendapatan yang terkumpul digunakan untuk pengeluaran, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang untuk pendanaan pembangunan atau manajemen krisis. Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk meninjau kembali kerangka kerja pengeluaran, menghilangkan pemborosan, dan memprioritaskan program berdasarkan analisis laba atas investasi.

### ***Pendekatan Strategis terhadap Pengembangan Keuangan***

Menanggapi tantangan keuangan tersebut, Kabupaten Jayawijaya telah mengembangkan sejumlah strategi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangannya. Di antaranya, memanfaatkan pemungutan pajak berbasis digital, mempromosikan pariwisata dan pertanian, mendirikan badan usaha milik daerah (BUMD), dan menjalin kerja sama investasi dengan pihak swasta.

Langkah-langkah lain yang dilakukan adalah menciptakan struktur anggaran yang fleksibel, membangun cadangan fiskal, dan menyiapkan dana darurat untuk menghadapi guncangan ekonomi seperti keterlambatan transfer dana atau ketidakstabilan ekonomi makro. Pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam domain manajemen keuangan, juga menjadi prioritas, dengan program pelatihan dan upaya modernisasi sistem yang sedang berlangsung di tingkat BPKAD dan OPD.

Meskipun ada inisiatif yang berwawasan ke depan ini, keberhasilannya bergantung pada kapasitas implementasi, koordinasi kelembagaan, dan kemauan politik untuk menegakkan reformasi. Hingga tahun 2023, sebagian besar strategi masih dalam tahap pengembangan, dengan hasil nyata yang belum diukur. Pemantauan berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan adaptif akan sangat penting untuk menerjemahkan strategi menjadi kinerja keuangan yang berkelanjutan.

## Diskusi

Kinerja keuangan Kabupaten Jayawijaya selama periode 2013–2023 menunjukkan realitas yang beraneka ragam yang ditandai oleh ketidakseimbangan yang signifikan antara efektivitas pendapatan, otonomi keuangan, pertumbuhan, dan efisiensi. Meskipun indikator tertentu, seperti efektivitas pendapatan, menunjukkan hasil yang luar biasa, masalah struktural yang lebih mendalam masih ada di bidang kemandirian dan keberlanjutan fiskal. Pembahasan ini memadukan temuan dengan teori yang sudah ada dan literatur perbandingan untuk mengontekstualisasikan posisi fiskal Jayawijaya dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah yang lebih luas di Indonesia.

Masalah kritis yang teridentifikasi adalah rasio otonomi keuangan yang sangat rendah, yang rata-rata hanya 6,44% selama periode 11 tahun. Angka ini benar-benar masuk dalam kategori “instruksi”, yang menunjukkan bahwa sistem fiskal Jayawijaya sangat bergantung pada transfer dan pinjaman pemerintah pusat. Hal ini sejalan dengan penilaian sebelumnya oleh Buchary Akbar Jumati et al. (2020), yang mencatat bahwa tingkat desentralisasi keuangan di Jayawijaya tetap dalam kategori “buruk” antara tahun 2016–2020. Dari perspektif teoritis, otonomi fiskal sangat penting untuk mewujudkan prinsip-prinsip desentralisasi, khususnya dalam meningkatkan responsivitas dan akuntabilitas daerah. Menurut Mardiasmo (2002), kemandirian keuangan yang sejati membutuhkan sumber pendapatan yang beragam dan mobilisasi pajak dan retribusi daerah yang efektif—kondisi yang jelas kurang di Jayawijaya.

Sebaliknya, efektivitas dalam mengumpulkan pendapatan asli daerah (PAD) telah menjadi contoh yang baik, dengan realisasi rata-rata sebesar 166,38% selama periode penelitian. Tingkat efektivitas ini menunjukkan kapasitas teknis yang kompeten dalam badan pendapatan daerah dan kemampuan untuk mencapai atau melampaui target. Namun, sebagaimana dicatat dalam literatur, khususnya oleh Siregar dan Nasution (2015), efektivitas yang tinggi harus diperiksa secara kritis terkait dengan praktik penetapan target. Dalam kasus Jayawijaya, target PAD yang terlalu konservatif merusak kredibilitas angka efektivitas, karena pertumbuhan pendapatan aktual tidak sesuai dengan peningkatan proporsional dalam kemandirian finansial atau hasil pemberian layanan.

Kinerja pertumbuhan PAD, total pendapatan, dan belanja Kabupaten Jayawijaya menunjukkan adanya kelemahan struktural yang lebih dalam. Rata-rata pertumbuhan PAD sebesar 18,70%, pertumbuhan pendapatan sebesar 9,17%, dan pertumbuhan belanja sebesar 10,28% semuanya masuk dalam kategori “tidak berhasil” sebagaimana ditetapkan oleh tolok ukur kinerja nasional. Hal ini mencerminkan basis fiskal yang stagnan, rentan terhadap gangguan ekonomi, dan sangat bergantung pada alokasi anggaran negara. Dalam beberapa tahun, PAD mengalami pertumbuhan negatif, seperti pada tahun 2019 dan 2021, yang kemungkinan besar disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi makro dan dampak pandemi COVID-19. Fitriani dkk. (2005) menekankan bahwa tanpa diversifikasi kegiatan ekonomi lokal, pemerintah daerah tetap rentan terhadap guncangan fiskal eksternal, situasi yang tercermin jelas di Jayawijaya.

Efisiensi dalam manajemen keuangan masih menjadi masalah mendesak lainnya. Rasio efisiensi rata-rata sebesar 99,09% menunjukkan bahwa hampir semua pendapatan yang tersedia diserap oleh pengeluaran rutin dan pembangunan, sehingga hanya menyisakan sedikit ruang untuk fleksibilitas fiskal atau penghematan. Meskipun tidak efisien dalam arti defisit, tingkat pengeluaran ini dikategorikan sebagai “kurang efisien” dan menunjukkan margin anggaran yang ketat. Mardiasmo (2002) dan Sihombing (2017) berpendapat bahwa pengelolaan keuangan publik yang efisien seharusnya menghasilkan surplus operasional yang dapat diinvestasikan kembali dalam perbaikan infrastruktur atau layanan. Namun, profil efisiensi saat ini di Jayawijaya menunjukkan kerangka pengeluaran yang kaku dengan kapasitas terbatas untuk investasi strategis atau perencanaan ketahanan.

Secara strategis, pemerintah daerah telah menginisiasi sejumlah program yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas keuangannya. Program-program tersebut meliputi digitalisasi sistem pemungutan pajak, pengembangan sektor-sektor potensial seperti pertanian dan pariwisata, serta pendirian BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). Dari sisi kebijakan, upaya-upaya tersebut sejalan dengan model-model reformasi fiskal yang direkomendasikan oleh Ana Sopanah dkk. (2020) yang menekankan pada diversifikasi, adopsi teknologi, dan penguatan kelembagaan. Selain itu, inisiatif Jayawijaya untuk membangun cadangan fiskal dan mengadopsi mekanisme penganggaran fleksibel menjadi sangat penting, mengingat volatilitas dana transfer dan paparan risiko ekonomi makro. Strategi-strategi tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran akan perlunya

reformasi struktural dan pentingnya bergerak melampaui sekadar kepatuhan menuju ketahanan keuangan strategis.

Namun, menerjemahkan tujuan strategis ini menjadi hasil yang terukur masih menjadi tantangan. Keberhasilan reformasi tersebut tidak hanya bergantung pada desain kebijakan tetapi juga pada kapasitas implementasi, kepemimpinan lokal, koordinasi antarlembaga, dan partisipasi masyarakat. Seperti yang dicatat oleh Pratiwi (2018), keterlibatan publik dan transparansi sangat penting dalam mempertahankan reformasi fiskal, khususnya di daerah dengan moral pajak yang rendah secara historis dan pengawasan sipil yang terbatas. Oleh karena itu, pemerintah Jayawijaya harus memastikan bahwa reformasi bersifat inklusif, berbasis data, dan terus dievaluasi berdasarkan indikator kinerja yang terukur.

Tantangan lainnya terletak pada kendala geografis dan sosial ekonomi. Lokasi Jayawijaya di dataran tinggi Papua menghadirkan kendala logistik dan infrastruktur yang signifikan yang membatasi diversifikasi ekonomi. Medan yang terjal dan kurangnya akses jalan dari daerah pesisir meningkatkan biaya transportasi, menghambat perdagangan, dan menghambat pengembangan usaha lokal. Meskipun hal ini sebagian diimbangi oleh potensi pariwisata dan pertanian di wilayah tersebut, sektor-sektor ini masih terbelakang dan membutuhkan investasi besar untuk menjadi penyumbang PAD yang layak. Dengan demikian, kebijakan fiskal harus disinkronkan dengan rencana pembangunan daerah yang lebih luas yang mengatasi kesenjangan infrastruktur dan kekurangan sumber daya manusia.

Singkatnya, pembahasan ini mengungkap dikotomi antara keberhasilan pengumpulan pendapatan jangka pendek dan tantangan keberlanjutan fiskal jangka panjang. Efektivitas keuangan Jayawijaya patut dipuji tetapi rapuh, dan harus didukung oleh strategi pertumbuhan yang kuat dan reformasi kelembagaan. Peningkatan otonomi fiskal tidak hanya memerlukan peningkatan PAD, tetapi juga transformasi ekonomi lokal dan struktur tata kelola. Perjalanan daerah menuju ketahanan fiskal dimungkinkan, tetapi akan memerlukan komitmen politik yang berkelanjutan, investasi strategis, dan pendekatan inklusif terhadap tata kelola keuangan.

## **KESIMPULAN**

Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya selama periode 2013–2023 menunjukkan lanskap fiskal yang kompleks. Meskipun daerah tersebut menunjukkan efektivitas yang kuat dalam mengelola pendapatan asli daerah (PAD), dengan realisasi rata-rata 166,38%, namun otonomi keuangan daerah masih sangat rendah (rata-rata 6,44%), yang menunjukkan ketergantungan yang besar pada transfer pemerintah pusat. Selain itu, kinerja pertumbuhan daerah baik dalam pendapatan maupun belanja masih di bawah tolok ukur nasional, yaitu rata-rata di bawah 30%, sehingga dikategorikan tidak berhasil. Rasio efisiensi, yang rata-rata 99,09%, semakin menyoroti struktur fiskal yang ketat dengan surplus yang minimal, sehingga kurang memberikan fleksibilitas untuk investasi pembangunan jangka panjang. Menanggapi tantangan tersebut, pemerintah Jayawijaya telah mengadopsi sejumlah strategi berwawasan ke depan, seperti digitalisasi pemungutan pajak, pengembangan BUMD, investasi di sektor-sektor utama seperti pariwisata dan pertanian, serta penciptaan kerangka kontinjensi fiskal. Namun, keberhasilan inisiatif-inisiatif ini bergantung pada implementasi reformasi kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan masyarakat yang efektif. Studi ini berkontribusi pada wacana tata kelola fiskal daerah dengan menawarkan penilaian longitudinal yang komprehensif dan memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat otonomi keuangan, efisiensi, dan pertumbuhan dalam batasan-batasan daerah otonomi khusus. Temuan-temuan ini menggarisbawahi pentingnya transformasi struktural untuk keberlanjutan dan ketahanan fiskal di daerah-daerah terpencil dan terbelakang seperti Jayawijaya.

## **References**

- Aeni, SN (2020). Analisis rasio untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tegal Tahun 2015–2019 [Skripsi]. Politeknik Harapan Bersama.
- Akbar Jumati, JB, dkk. (2020). Laporan analisis fiskal Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016–2020.
- Ana Sopanah, dkk. (2020). akuntansi publik. Surabaya: Scorpindo Media Pustaka.
- Arumdari, R. (2019). Analisis rasio keuangan daerah dalam penilaian kinerja keuangan pemerintah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan Tahun 2013–2017 [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Chevin, AC (2021). Analisis kinerja keuangan pada masa pandemi COVID-19 di BPKAD Kabupaten Lombok Barat.
- Fitrani, E., Harahap, DM, & Kuncoro, M. (2005). Dampak fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 10(2), 171–186.

- Halim, A. (2008). Manajemen keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi sektor publik. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L.J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran kebijakan fiskal terhadap perekonomian di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2986-2997.
- Norma. (2020). Analisis kinerja keuangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016–2018 [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2021, February). The Effect of Capital Intensity and Inventory Intensity on Tax Avoidance at Food and Beverage Subsector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). In *International Conference on Strategic Issues of Economics, Business and, Education (ICoSIEBE 2020)* (pp. 221-225). Atlantis Press.
- Pasetya, A. (2019). Analisis kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008–2012 [Skripsi].
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pratiwi, D. (2018). Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 22–35.
- Primandita, F., dkk. (2020). Bunga rampai keuangan negara. Banten: Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Rinaldi, M., Irawan, D., & Nasution, A. R. (2022). Comparison Of Human Development Index Before And During The Covid-19 Pandemic. *Enrichment: Journal of Management*, 12(2), 2404-2408.
- Sihombing, J. (2017). Pengaruh investasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 15(1), 25–38.
- Siregar, AL, & Nasution, DPR (2015). Transparansi dan akuntabilitas fiskal dalam meningkatkan efektivitas PAD. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 4(3), 18–27.
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tirtayasa, S., Yusri, M., & Rinaldi, M. (2022). Business Strategies of MSMEs During COVID-19, Deli Serdang, Indonesia. *KnE Social Sciences*, 434-441.
- Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.